

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Atsar dan Rani Apriani, 2019, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Deepublish, Yogyakarta.
- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Cetakan kedua, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta
- AT, Andi Mappiare, 2009 *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*, Jengala Pustaka Utama, Malang.
- Budiardjo, Miriam, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Budiono, Herlien, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia : Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chandra, S, 2005, *Sertifikat kepemilikan Hak Atas Tanah*, Grasindo, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2004, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- , 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Indroharto, 1991, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pusaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan konsumen*, PT. Sinar Gr
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Philipus M. Hadjon dkk, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Sutedi, Adrian, 2008, *Peralihan Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2023, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Peraturan Perundang – Undangan

Sk. Ka BPN No. 354/ Kep – 100. 17.3/VIII/2014

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas PP No. 37 Tahun 1988 tentang peraturan jabatan PPAT.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1977 tentang pendaftaran tanah

Karya Ilmiah

Jurnal

Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat, 2019, *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*, Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 18 No. 1.

Christin, Dona, 2017, *Analisis Atas Diketahuinya Cacat Yuridis Pada Akta Jual Beli Tanah Dan Rumah Yang Dibuat Oleh PPAT (Putusan Mahkamah Agung No. 2333 K/Pdt/2015)*, *Premise Law Journal* Volume 14, no. 3

I Gusti Agung Dhenita Sari, I Gusti Ngurah Wairocana, Made Gede Subha Karma Resen, 2018, *Kewenangan Notaris dan PPAT dalam proses pemberian hak guna bangunan atas tanah hak milik*, *Jurnal Magister Kenotariatan Universitas Udayana*

Khasanah, Chintya Ainun, 2019, *Kewenangan Notaris Dalam membuat akta Pertanahan*, *Jurnal Universitas Negeri Surabaya Jurusan Hukum*.

Luna Diana Puteri, Taupiqqurrahman, 2022, *Kepemilikan Atas Apartemen Oleh Warga Negara Asing Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 1

Mujiburohman, Dian Aris, 2018, *Jurnal Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*, BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol.4 No.1

Niken Wahyuning Retno Mumpuni dan Wahyu Adi Mudiparwanto, 2021, *Tinjauan yuridis pengelolaan barang berupa tanah dan bangunan milik negara di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD)*, Jurnal Yuridis Vol. 8, No. 1.

Nola, Luthvi Fabryka, 2016, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Negara Hukum Vol. 7 No. 1

Rizki Amalia, Muhammad Arifin, Adi Mansar, 2021, *Tanggung Jawab Notaris Yang Membatalkan Akta Atas Permintaan Penjual Secara Sepihak Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Yuridis Vol. 8 No. 1.

Wibawa, Kadek Cahya Susila, 2019, *Menakar kewenangan dan Tanggung Jawab pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam perspektif Bestuursbevoegdheid*, Jurnal Crepindo Vo. 01, No .01

Website/Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 10 januari 2023

<https://www.kompasiana.com/fitriselviani/608c84bf8ede4806882fbef2/kewenangan-dalam-administrasi-negara>, <https://www.seluncur.id/unsur-unsur-perlindungan-hukum/>, diakses pada 1 Januari 2023 pada pukul 16:49 WIB

<https://www.latifamustafida.com/2022/12/bolehkah-ppat-legalisir-dokumen-ini.html>, diakses pada 23 Mei 2023 pada pukul 17.30 WIB

Sumber lainnya

Wawancara Pejabat BPN, Senin, 12 Juni 2023 pukul 20.43 WIB

Wawancara PPAT, Rabu 14 Juni 2023 pukul 21.45 WIB

Wawancara Notaris/PPAT, Sabtu 17 Juni 2023 pukul 15.13 WIB